



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 27

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran dan tujuan reformasi birokrasi diperlukan adanya panduan yang digunakan sebagai gerakan dalam bentuk *road map* reformasi birokrasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan mengenai *road map* reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi adalah pedoman rencana kerja *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana program kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Mei 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2021-2024

Bab 1. Pendahuluan

Latar Belakang

Pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 menjadikan banyak sekali perubahan dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyesuaikan berbagai macam pelaksanaan pemerintahan yang dapat mengatasi dampak covid 19, termasuk dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai salah satu esensi dalam tugas pemerintahan. Organisasi birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai alat penghubung antara negara dengan masyarakat tersebut maka organisasi birokrasi dituntut untuk mampu dan mau mengikuti serta menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, baik perubahan yang berlangsung secara cepat (revolusi) ataupun yang berlangsung secara lambat (evolusi). Perubahan tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi yang prima dalam mengatasi problematika pembangunan yang semakin kompleks, serta untuk dapat menjawab tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat dan fleksibel. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024 merupakan *Road Map* estafet dari dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan bertujuan untuk memberikan arah mengenai perubahan dimaksud.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 Pemerintah Kota Magelang berisi uraian mengenai gambaran kondisi **capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang lima tahun ini, dan kondisi reformasi birokrasi yang diharapkan dalam masa pemerintahan tahun mendatang**, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu terwujudnya wajah birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

A. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Namun mempertimbangkan UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu 2020 maka *Road Map* RB Kota Magelang akan disesuaikan berdasarkan masa jabatan walikota terpilih yaitu selama 3 tahun, sehingga *Road Map* RB Kota Magelang akan sinkron dengan dokumen RPJMD Kota Magelang. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu bagi Kepala Daerah selanjutnya dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 memotret capaian RB tahun-tahun sebelumnya dan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Magelang dan kepala daerah yang baru, yang pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

C. Dasar Hukum Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Bab 2. Gambaran Birokrasi

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Magelang

Gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh 52 Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dan UPT dengan kekuatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada **tahun 2019** sebanyak 2.842 pegawai, dengan kualifikasi pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, S-2 sebanyak 269 orang, D4/S-1 sebanyak 1403 orang, D-III sebanyak 447 orang, D-II/D1 sebanyak 75 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 450 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 113 orang dan SD sebanyak 83 orang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan menuju perwujudan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Adapun hasil penilaian diri (*self assessment*) yang merupakan titik awal terkait dengan **hal-hal yang sudah baik dicapai** sebagaimana 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Tewujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- 1.1 Telah dicanangkannya Zona Integritas di Pemerintah Kota Magelang.
- 1.2 Telah disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi.
- 1.3 Telah disusun Masterplan Reformasi Birokrasi yang merupakan pemetaan area kritikal dari 8 (delapan) area perubahan birokrasi di Kota Magelang
- 1.4 Seluruh pejabat struktural dilingkup Pemerintah Kota Magelang telah menandatangani Pakta Integritas.
- 1.5 Dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintahan, seluruh pejabat Eselon II,III dan IV di Kota Magelang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- 1.6 Pemerintah Kota Magelang juga telah menerapkan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa dengan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- 1.7 Untuk mendapatkan kualitas/kapabilitas dalam proses rekrutmen CPNS telah dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test*.
- 1.8 Telah disusunnya dokumen penilaian resiko di tiap Perangkat Daerah
- 1.9 Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi dan pungli

2. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

- 2.1 Mendapatkan penilaian dengan katagori baik dalam survey integritas DPMPSTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 2.2 Telah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sarana perlindungan konsumen.
- 2.3 Memperoleh penghargaan Investment Award sebagai 10 besar Nasional Penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
- 2.4 Memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 di bidang layanan pemerintah daerah untuk Penerbitan Izin dan Layanan Administrasi Umum.
- 2.5 Memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 di bidang pendidikan pada beberapa sekolah di Kota Magelang.
- 2.6 Implementasi inovasi pelayanan berbasis TI terkait pelayanan administrasi kependudukan yaitu : SI BULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akte Kelahiran), SI SAKTI (Aksi Siap Antar Akte Kematian), SI JEMPOLAN (Aksi Siap Jemput Bola Pelayanan), SI TITAK (Aksi Tim Tanggap KIA), SI ANDALAN (Aksi Siap Antar Dokumen Sampai Alamat Tujuan), KONTAK TIDAR (Kondisikan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Teknologi Informasi Daring).
- 2.7 Implementasi inovasi pelayanan berbasis TI terkait pelayanan perizinan YANLING ASOI (Pelayanan Keliling Aplikasi Simpadu dan Online Single Submission), SI DESAKU (Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terpadu)
- 2.8 Mendapatkan penilaian dengan kategori sangat baik sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP Kota Magelang.
- 2.9 Mendapatkan juara III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam kegiatan inovasi Perangkat Daerah dan BUMD Kota Magelang Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Balitbang Kota Magelang dengan Judul Pelayanan Akta Kematian lewat *Whatsapp* dan Gratis (PAK WARIS).
- 2.10 Mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang atas Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan KTP-el, sehingga Kota Magelang Berhasil Mencapat Target Penerbitan KTP-el Sesuai Jumlah Wajib KTP-el yang Telah Ditetapkan Tahun 2016.
- 2.11 Mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang atas Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Sehingga Kota Magelang Menduduki Peringkat Kedelapan Dalam Mencapai Target Nasional Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016 Lebih Cepat dari Batas Waktu Yang telah Ditetapkan.

- 2.12 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan layanan adminduk secara daring yang terintegrasi
- 2.13 Tersusunnya dokumen pengaduan masyarakat dalam rangka tertib adminduk dan perizinan
- 2.14 Penggunaan Tanda tangan elektronik pada semua dokumen Administrasi Kependudukan.
- 2.15 Pembayaran online pajak daerah bekerjasama dengan perbankan.
- 2.16 Pelayanan pembayaran layanan pajak satu pintu.
- 2.17 Untuk memperpendek hirarki birokrasi sebanyak 84 perizinan dan non perizinan telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2.18 Telah tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Magelang.
- 2.19 Adanya pelayanan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan nomenklatur IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan tujuan memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan rumah tinggal.
- 2.20 Nilai rata-rata pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2015-2019 berkategori baik.
- 2.21 Diberikannya Bea Siswa bagi siswa SD/SMP berprestasi dan siswa kurang mampu di Kota Magelang.
- 2.22 Adanya kebijakan penambahan point domisili dan sekolah asal, bagi anak dari Kota Magelang yang akan mendaftarkan sekolah SD/SMP di Kota Magelang.
- 2.23 Adanya Santunan Dana Kematian bagi penduduk miskin di Kota Magelang.
- 2.24 Memperoleh Penghargaan Adipura dan Adipura Kencana.
- 2.25 Telah memperoleh Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- 2.26 Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 melalui inovasi Data Kota Magelang Open (DataGO).
- 2.27 Penyelenggaraan IGD Khusus Covid 19 (terpisah dari IGD umum)
- 2.28 Penanganan Covid terpadu (pelayanan Hemodialisa, Bedah Sentral, VK /ruang bersalin dll untuk pasien Covid)
- 2.29 Alih Fungsi Gedung Dahlia (bangsal D1 sd D5 , dulu sebagai unit stroke, bangsal anak, bangsal umum kelas 1 dan VIP, Menjadi Bangsal Isolasi Covid 19)
- 2.30 Penambahan Tempat Tidur, dan Bangsal Edelweis sebagai bangsal isolasi Covid 19.
- 2.31 Inovasi Hatii Pakkem (Hazmat dari RSUD Tidar Inovasi Coverall Pakai Kembali) dalam menghadapi kelangkaan APD dilapangan.

- 2.32 Suster Mahisa (Sinar Ultraviolet Sterilisasi Masker Higienis dan Aman) alat untuk sterilisasi masker N95 sebagai salah satu upaya Untuk menekan terjadinya infeksi terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien.
- 2.33 Sesuaikan dengan pertanyaan LKE PMPRB

3. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- 3.1 Telah diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kota Magelang.
- 3.2 Telah dilaksanakan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Magelang secara terus-menerus.
- 3.3 Telah dilaksanakannya Analisis Jabatan untuk pejabat struktural dan fungsional umum di Kota Magelang.
- 3.4 Telah disusun Dokumen Analisis Beban Kerja.
- 3.5 Telah disusun Dokumen Pola Hubungan Kerja.
- 3.6 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang telah disusun tepat waktu.
- 3.7 Telah diterapkannya *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- 3.8 Telah diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana Peraturan Walikota Magelang No 63/2013 untuk efisiensi dan efektivitas penganggaran program/kegiatan.
- 3.9 Telah diterapkan Sistem Keuangan Daerah (SIMDA).
- 3.10 Telah diterapkan Sistem Kepegawaian (SIMPEG).
- 3.11 Inventarisasi dan re-evaluasi asset daerah secara optimal.
- 3.12 Tersusunnya dokumen LKJIP di semua Perangkat Daerah.
- 3.13 Memperoleh Penghargaan di Bidang Perencanaan tingkat Nasional.
- 3.14 Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural (2018)

B. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kota Magelang telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun hasil penjarangan aspirasi atas **kebutuhan/harapan** dari para pemangku kepentingan sesuai dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- 1.1 Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang menandatangani pakta integritas
- 1.2 Perekrutan dan penyusunan formasi kebutuhan SDM (ASN, Honorer Daerah, Tenaga Harian Lepas) yang efektif dan efisien.
- 1.3 Pembentukan dan pembaharuan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana di tingkat Kota dan tingkat satuan kerja, diharapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terintegrasi dan tercapai secara maksimal.
- 1.4 Optimalisasi Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 1.5 Penguatan peran APIP dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 1.6 Penetapan Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) percontohan/*pilot project* bebas KKN di lingkup Pemerintah Kota Magelang.
- 1.7 Pilot project Pembangunan Zona integritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Kota Magelang dan mendapat penilaian WBK WBBM oleh kementerian RB.

2. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

- 2.1 Optimalisasi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- 2.2 Peningkatan jaminan mutu atas pelayanan dokumen kependudukan dan perizinan melalui sertifikat ISO (memerlukan pendampingan dan pembenahan untuk mendapatkan sertifikat ISO bagi Disdukcapil dan resertifikasi untuk DPMPTSP Kota Magelang.)
- 2.3 Peningkatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan perluasan cakupan hak akses pemanfaatan data Adminduk kepada instansi pelayanan publik.
- 2.4 Terwujudnya layanan pencetakan dokumen kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
- 2.5 Pengembangan *e-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi kepada masyarakat dengan peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan penunjang layanan bagi seluruh Unit Pelayanan Publik Kota Magelang menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2.6 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik
- 2.7 Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan daring yang terintegrasi

- 2.8 Peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan kesehatan di BLUD RSUD Tidar Magelang Terutama dalam penanganan Covid 19 mengingat RSUD Tidar sebagai RS rujukan Lini 1 oleh Kemenkes.
- 2.9 Peningkatan Pelayanan kesehatan di semua faskes di Kota Magelang (baik terkait covid 19 maupun layanan kesehatan umum lain)
- 2.10 Pemantauan kondisi kesehatan lingkungan di Kota Magelang.
- 2.11 Peningkatan upaya dan pemenuhan standar kesehatan di Puskesmas.
- 2.12 Peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas Kota Magelang.
- 2.13 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya di Kota Magelang.
- 2.14 Peningkatan penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat.
- 2.15 Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung.
- 2.16 Terlaksananya Standar Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan khususnya untuk babi dari satu kompleks Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
- 2.17 Peningkatan Cakupan pemberian Bea Siswa bagi siswa SD/SMP berprestasi dan siswa kurang mampu di Kota Magelang .
- 2.18 Media pengaduan *on-line* tingkat kota terhadap seluruh pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Kota Magelang, yang dapat diakses secara mudah, cepat dan transparan dan terintegrasi secara nasional.
- 2.19 Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi periodik terhadap regulasi daerah di bidang pelayanan publik .
- 2.20 Pelibatan unsur masyarakat (tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan dunia usaha/asosiasi), memperhatikan hasil survey kepuasan dan pengaduan masyarakat dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan di unit-unit pelayanan yang ada di Pemerintah Kota Magelang.
- 2.21 Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan farmasi di Kota Magelang.
- 2.22 Banyaknya kasus yang harus diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak sebanding dengan jumlah anggota tim yang ada.
- 2.23 Penerapan sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik dengan akses publik.
- 2.24 Pelayanan perizinan keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2.25 Peningkatan/*upgrade* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri.
- 2.26 Adanya pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk memberikan keringanan pada tunggakan pajak wajib pajak.
- 2.27 Adanya pelayanan keliling pembuatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- 2.28 Teraplikasikannya Sistem Informasi Puskesmas secara optimal.
- 2.29 Pembentukan Tim Uji Kelayakan kualitas lingkungan dapat terpantau.?
- 2.30 Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih kota magelang (aktifasi laboratorium LH/kerjasama dengan IUWASH)

3. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Harapan dari internal birokrasi :

- 3.1 Perlunya sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3.2 Kualitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
- 3.3 Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi berorientasi hasil.
- 3.4 Perlunya review tupoksi dan uraian tugas Perangkat Daerah Kota Magelang.
- 3.5 Penyempurnaan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.
- 3.6 Perlunya review data Analisis Jabatan secara mendalam, agar tugas pokok dan fungsi PNS benar-benar jelas, terukur, tidak tumpah tindih, dan sinergi dengan tupoksi diatasnya.
- 3.7 Review pelimpahan kewenangan.
- 3.8 Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan.
- 3.9 Tersedianya dokumen evaluasi Standar Kompetensi Jabatan.
- 3.10 Penerapan sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik dengan akses publik.
- 3.11 Perlunya pembaharuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara *online*.
- 3.12 Tersedianya sistem informasi data dan dokumen kinerja ASN secara periodik
- 3.13 Perlunya peningkatan dan mempertahankan Kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik SPBE
- 3.14 Perlunya fasilitasi dalam rangka peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu.
- 3.15 Seluruh Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kota Magelang menyusun dokumen Serah Terima Jabatan pada saat mutasi jabatan, agar terdapat kesinambungan kinerja.
- 3.16 Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Pemerintah Kota Magelang.
- 3.17 Penerapan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai
- 3.18 Tercukupinya tenaga perancang peraturan perundang-undangan.
- 3.19 Perlunya dilakukan Reevaluasi/appraisal asset/barang daerah secara berkala.

- 3.20 Perlunya pemahaman agen perubahan melakukan proyek perubahan di Perangkat Daerah masing masing.

Adapun dari pemangku kepentingan eksternal pemerintah daerah antara lain:

- 3.1 Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- 3.2 Perlunya perubahan pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang budaya melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Magelang

Meskipun sudah banyak hal yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Hasil penilaian diri atau *self assessment* yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Tewujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- 1.1 Belum seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kota Magelang menandatangani Pakta Integritas.
- 1.2 Perekrutan dan penyusunan formasi kebutuhan SDM (ASN, Honorer Daerah, Tenaga Harian Lepas) yang efektif dan efisien.
- 1.3 Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana di tingkat Kota sudah terbentuk namun untuk tingkat satuan kerja belum semuanya terbentuk.
- 1.4 Masih diperlukannya penguatan Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 1.5 Masih diperlukannya penguatan kapabilitas APIP dalam rangka mempertahankan perolehan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 1.6 Penetapan Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) percontohan/*pilot project* WBK dan WBBM di lingkup Pemerintah Kota Magelang baru satu Perangkat Daerah.
- 1.7 Belum terbangunnya Zona integritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkup Pemerintah Kota Magelang dan mendapat penilaian WBK WBBM oleh kementerian RB sebagai kelanjutan dari pencanangan ZI

2. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

- 2.1 Belum seluruh unit layanan memahami dan mengimplementasikan seluruh substansi yang terkandung dalam amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah 96/2012 tentang Pelaksanaan UU 25/2009.
- 2.2 Sarana aduan belum terintegrasi dengan nasional dan dikelola secara baik dan transparan.(tindak lanjut atas aduan yang telah masuk guna perbaikan internal maupun eksternal organisasi dan integrasi dengan SP4N Lapor)
- 2.3 Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Standar Pelayanan. (perlunya semacam kuesioner, FKP yang melibatkan akademisi, LSM, warga masyarakat, professional untuk menjangkau saran masukan dari masyarakat)
- 2.4 Belum seluruh unit layanan mensosialisasikan Maklumat dan Janji Layanan secara *online* dan *offline* agar dapat dilihat oleh masyarakat dan pemohon layanan.
- 2.5 Belum terlaksananya standar Rumah Potong Hewan (RPH) khusus untuk hewan babi yang layak infrastrukturnya.
- 2.6 Masih ada beberapa kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan kepada DPMPTSP.

3. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Kurangnya komitmen pimpinan terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dengan cara menyelaraskan target sasaran pada *Road Map* RB dengan RPJMD, sehingga pimpinan biasanya *concern* pada target RPJMD. Proses *monev* berkala juga otomatis akan dipantau oleh Bappeda pada saat desk capaian kinerja. Selain itu pada saat perencanaan yang membutuhkan anggaran pun dari Bappeda karena merupakan kesamaan dari target RPJMD akan teranggarkan dalam kegiatan.
- 3.2 Perlunya perbaikan Standar Operasional Prosedur dalam segenap aspek pelayanan.
- 3.3 Perlunya menyusun peta proses bisnis dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas SOP untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.
- 3.4 Masih terdapatnya ketimpangan komposisi dan jumlah pegawai dengan beban kerja yang dihadapi sehingga diperlukan evaluasi ANJAB.
- 3.5 Belum optimalnya integrasi data dan penerapan tata laksana pemerintahan yang efektif efisien berbasis teknologi informasi sebagai pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 3.6 Dokumen Pola Hubungan kerja belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 3.7 Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah belum lancar.(peningkatan pelaksanaan si Abah) Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di tingkat unit kerja (Perangkat Daerah) secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk
- 3.8 Belum seluruh pejabat struktural dan fungsional umum memahami uraian tugas jabatan. (sosialisasi dan asistensi *cascading*) Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assessment* pegawai secara menyeluruh , melaksanakan evaluasi jabatan pada seluruh jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi.
- 3.9 Adanya pembinaan karier dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga berdampak hasil kerja kurang optimal.
- 3.10 Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. E kinerja
- 3.11 Sasaran Kinerja Pegawai belum dipahami secara luas. E kinerja
- 3.12 Belum seluruh Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kota Magelang menyusun dokumen Serah Terima Jabatan pada saat mutasi jabatan.
- 3.13 Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Magelang. (sudah ada tapi jumlahnya sedikit)
- 3.14 Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan pemerintah. (tiap awal tahun sudah di minta oleh inspektorat) Pengendalian risiko belum pernah dimasukkan dalam satu point dalam tupoksi ASN. Berikut dengan RTP /rencana tindak pengendalian. Idem seperti tupoksi : melaksanakan tugas dari pimpinan. Sehingga SPIP dilaksanakan sebatas administratif.
- 3.15 Masih perlunya sinkronisasi indikator kinerja dengan dokumen perencanaan.
- 3.16 Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang tidak tepat sasaran dan tidak terukur sehingga perlu asistensi Perangkat Daerah bersama kemenpan/kemendagri, bappeda, bagian organisasi sebagai *quick wins*.
- 3.17 Belum adanya *wistle blowing system* untuk identifikasi dan pencegahan potensi benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah dan penanganannya
- 3.18 Belum diterapkannya *Whistle Blowing System* di Pemerintah Kota Magelang

Bab 3. Agenda Reformasi Birokrasi

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Perubahan merupakan hal mendasar yang harus terus menerus dilakukan. Perubahan adalah peralihan menjadi suatu yang berbeda, dalam hal ini keadaan menjadi lebih baik. Dalam suatu organisasi apapun bentuknya pasti dituntut untuk berkembang, dengan tuntutan berkembang ini kemudian muncul ide kreatif untuk melakukan perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Manajemen perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Magelang diupayakan untuk mengarahkan agar setiap rangkaian proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang mencapai kinerja yang diharapkan. Tujuan rencana manajemen perubahan adalah sebagai panduan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah pengampu fokus perubahan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Magelang dalam mengelola perubahan terkait program reformasi birokrasi. Adapun secara garis besar fokus perubahan yang diharapkan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

No.	Area	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4.	Sumber daya manusia Aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan, kondisi dan harapan masyarakat
8.	Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Magelang difokuskan pada 5 (lima) prioritas perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kota Magelang

Fokus perubahan yang menjadi prioritas utama area perubahan reformasi birokrasi meliputi:

1.1 Sumber Daya Manusia Aparatur (area 4)

- 1.1.1 Seluruh pegawai Pemerintah Kota Magelang menandatangani pakta integritas.
- 1.1.2 Tertanamnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS.
- 1.1.3 Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- 1.1.4 Penataan kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Magelang sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 1.1.5 Seluruh pejabat struktural di Pemerintah Kota Magelang menyusun dokumen Serah Terima Jabatan pada saat mutasi jabatan.
- 1.1.6 Evaluasi Dokumen Standar Kompetensi Jabatan.
- 1.1.7 Evaluasi dokumen Analisis Jabatan.
- 1.1.8 Pengembangan Karier melalui manajemen talenta dengan melakukan assessment secara berkala
- 1.1.9 Penerapan E Kinerja untuk memantau dan mengukur kinerja ASN secara periodik
- 1.1.10 Penerapan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai
- 1.1.11 Optimalisasi kuantitas dan kualitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 1.1.12 Optimalisasi peran satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 1.1.13 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perancang perundang-undangan.
- 1.1.14 Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu.
- 1.1.15 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik PNS.

1.2 Tatalaksana (area 2, area 3)

- 1.2.1 Perbaikan dan sinkronisasi SAKIP
- 1.2.2 Penyusunan Peta Proses Bisnis
- 1.2.3 Penyusunan mekanisme *Wistle Blowing System*

- 1.2.4 Penyusunan perwal benturan kepentingan
- 1.2.5 Adanya harmonisasi produk hukum Pusat dan Daerah.
- 1.2.6 Review pelimpahan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP. (Dilakukan dengan menginventarisir berapa jumlah perizinan yang ada di Kota Magelang yang menjadi kewenangan DPMPTSP dan berapa yang sudah dilimpahkan. Kemudian dibuat persentase. Target capaian tertuang dalam dokumen rencana aksi.)
- 1.2.7 Adanya Standar Operasional Prosedur dalam segenap aspek pelayanan di tiap unit kerja.
- 1.2.8 Adanya sarana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan.
- 1.2.9 Adanya mekanisme yang jelas terhadap pengaduan *on-line* tingkat kota terhadap seluruh pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Kota Magelang.

1.3 Organisasi (area 1)

- 1.3.1 Pembentukan dan penguatan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kota dan Perangkat Daerah.
- 1.3.2 Penetapan Perangkat Daerah percontohan/*pilot project* bebas KKN dilingkup Pemerintah Kota Magelang.
- 1.3.3 Pembangunan Zona Integritas berpredikat WBK WBBM
- 1.3.4 Review tugas pokok dan fungsi sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- 1.3.5 Review Analisis Jabatan.
- 1.3.6 Review Analisis Beban Kerja.
- 1.3.7 1 Perangkat Daerah 1 inovasi (*One Agency One Innovation*)

2. Prioritas capaian yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi:

2.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (area 5)

- 2.1.1 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh pejabat eselon II, III, IV di Kota Magelang.
- 2.1.2 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi.

- 2.1.3 Penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa melalui UKPBJ.
- 2.1.4 Inventarisasi dan re-evaluasi asset daerah.
- 2.1.5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang tepat waktu.
- 2.1.6 Penerapan Analisis Standar Belanja untuk efisiensi dan efektifitas penganggaran program/kegiatan.

2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (area 7)

- 2.2.1 Penguatan kelembagaan BPSK
- 2.2.2 Terpeliharanya manajemen mutu bidang pendidikan
- 2.2.3 Terpeliharanya manajemen mutu bidang kesehatan
- 2.2.4 Terpeliharanya manajemen mutu bidang layanan pemerintah daerah untuk penerbitan izin dan layanan administrasi umum.
- 2.2.5 Pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu di Kota Magelang
- 2.2.6 Nilai rata-rata hasil *survey* kepuasan masyarakat berkategori baik

2.3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (area 6)

- 2.3.1 Terwujudnya organisasi pemerintah daerah yang tepat struktur dan fungsi
- 2.3.2 Terwujudnya pengembangan sistem informasi manajemen di tiap Perangkat Daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- 2.3.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- 2.3.4 Terwujudnya indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang SMART.

3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan *quick wins*.

3.1 Pelayanan Sektor-Sektor Strategis

Pelayanan pada sektor strategis di Pemerintah Kota Magelang yang memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitas layanan di fokuskan dalam 3 (tiga) sektor dasar, meliputi :

3.1.1 Sektor Kesehatan

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, bidang kesehatan menjadi prioritas perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimasa pandemi covid 19 sektor kesehatan menjadi sektor yang menjadi prioritas dan ujung tombak dalam penanganan maupun pencegahan covid 19 di Kota Magelang. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dasar secara tegas menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34 UUD 1945). Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai baik sebagai upaya preventif maupun kuratif adalah hak setiap warga negara. Berpijak dari hal tersebut maka sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kota Magelang. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- 3.1.1.1 Peningkatan dan inovasi sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan kesehatan dalam menghadapi pandemi covid 19 maupun permasalahan kesehatan lain di BLUD RSUD Tidar Magelang.
- 3.1.1.2 Perlunya pemenuhan standar kesehatan di Puskesmas.
- 3.1.1.3 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya di Kota Magelang.
- 3.1.1.4 Penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat.
- 3.1.1.5 Peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas Kota Magelang.
- 3.1.1.6 Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang kesehatan.
- 3.1.1.7 Pemantauan kondisi kesehatan lingkungan di Kota Magelang.
- 3.1.1.8 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan farmasi di Kota Magelang.
- 3.1.1.9 Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan.
- 3.1.1.10 Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan.
- 3.1.1.11 Optimalisasi integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS.
- 3.1.1.12 Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).

3.1.2 Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib diperoleh oleh semua warga. Disamping hal tersebut pendidikan juga dapat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Berbagai alasan krusial yang mendukung pernyataan dimaksud antara lain, karena pendidikan memberikan nilai balik yang tinggi, sekaligus pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi, disamping memiliki banyak fungsi seperti sosial-kemanusiaan, politis, dan budaya. Adapun berbagai upaya Pemerintah Kota Magelang yang akan dicapai dalam sektor ini adalah:

- 3.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung.
- 3.1.2.2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pendidikan.
- 3.1.2.3 Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang pendidikan dasar melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu.
- 3.1.2.4 Optimaslisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang pendidikan.
- 3.1.2.5 Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan *survey* kepuasan di bidang pendidikan.
- 3.1.2.6 Pemberian bea siswa bagi siswa SD/SMP berprestasi dan siswa kurang mampu di Kota Magelang.

3.1.3 Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Sektor administrasi kependudukan dan perijinan selalu menjadi sorotan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya saran dan masukan yang disampaikan masyarakat, terkait dengan proses pelayanan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah antara lain :

- 3.1.3.1 Optimalisasi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 3.1.3.2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang perizinan.
- 3.1.3.3 Identifikasi dan inventarisir jenis-jenis perizinan baru yang akan dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- 3.1.3.4 Pelayanan perekaman dan perizinan keliling.
- 3.1.3.5 Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan.
- 3.1.3.6 Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan.
- 3.1.3.7 Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan *survey* kepuasan di bidang perijinan.
- 3.1.3.8 Optimalisasi Pelayanan Perizinan secara *Online* didukung dengan pengembangan teknologi informasi.
- 3.1.3.9 Pendirian Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan Kementrian, Lembaga maupun perbankan yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- 3.1.3.10 Integrasi Sistem Informasi dan Bagi Pakai Data antar Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program penggunaan satu data.
- 3.1.3.11 Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada
- 3.1.3.12 Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi
- 3.1.3.13 Pengelolaan pengaduan masyarakat
- 3.1.3.14 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- 3.1.3.15 Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan daring (layanan terintegrasi).
- 3.1.3.16 Peningkatan jaminan mutu atas pelayanan dokumen kependudukan melalui sertifikat ISO (memerlukan pendampingan dan pembenahan untuk mendapatkan sertifikat ISO bagi Disdukcapil dan DPMPTSP Kota Magelang.)
- 3.1.3.17 Pengembangan *e-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dengan peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan penunjang layanan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 3.1.3.18 Edukasi masyarakat melakukan pelayanan adminduk daring
- 3.1.3.19 Peningkatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan perluasan cakupan hak akses pemanfaatan data Adminduk kepada instansi pelayanan publik.
- 3.1.3.20 Terwujudnya layanan pencetakan dokumen kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

3.2 Quick Wins

Adapun jenis pelayanan yang akan dijadikan *quick wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan.

Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan baik pelayanan berkaitan dengan penanganan covid 19 maupun pelayanan bersifat umum di Pemerintah Kota Magelang, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- Perubahan yang cepat terhadap kualitas jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* program reformasi birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Penyediaan dan perbaikan sarana aduan (Complaint Handling) masyarakat secara *online* yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan responsif oleh seluruh warga Kota Magelang dan terintegrasi dengan sarana aduan nasional (SP4N LAPOR).
- 3.2.2 Penyediaan dan perbaikan sarana pelaporan dan penanganan pasien covid 19 (optimalisasi satgas covid 19)
- 3.2.3 Optimalisasi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 3.2.4 Evaluasi dokumen analisis jabatan.
- 3.2.5 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) online.
- 3.2.6 Penyusunan dan perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*) Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah).
- 3.2.7 Pendirian Mall Pelayanan Publik
- 3.2.8 Penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada semua Perangkat Daerah untuk dokumen pemerintahan untuk mempercepat waktu pelayanan kepada masyarakat maupun internal di Pemerintah Kota.

- 3.2.9 Penyediaan Anjungan Dukcapil Mandiri agar masyarakat bisa memproses dokumen kependudukan sendiri.
- 3.2.10 Pengendalian covid 19 dengan pengambilan swab massal di tempat umum.
- 3.15 Implementasi inovasi pelayanan berbasis TI terkait pelayanan administrasi kependudukan yaitu : SI BULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akte Kelahiran), SI SAKTI (Aksi Siap Antar Akte Kematian), SI JEMPOLAN (Aksi Siap Jemput Bola Pelayanan), SI TITAK (Aksi Tim Tanggap KIA), SI ANDALAN (Aksi Siap Antar Dokumen Sampai Alamat Tujuan), KONTAK TIDAR (Kondisikan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Teknologi Informasi Daring).
- 3.2.11 Inovasi layanan public daring lintas Perangkat Daerah secara terintegrasi.

4. Zona Integritas (area 4,5, 6,7, 8) (miniatur RB)

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sejauh ini Pemerintah Kota Magelang telah mencanangkan Zona Integritas, yang penancangannya dilaksanakan serentak pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2014 di Semarang. Sebagai tindaklanjut dari penancangan tersebut Pemerintah Kota Magelang melalui Unit Penggerak Integritas (*Inspektorat*) bersama instansi terkait **diharapkan** dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada Perangkat Daerah yang akan dijadikan sebagai **percontohan WBK/WBBM** dilingkungan Pemerintah Kota Magelang. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

5. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (area 8)

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah, sekaligus menjadi fokus perhatian, dimana Perangkat Daerah membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kota Magelang. Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Prioritas-prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- 5.1 Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang didalamnya meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Maklumat/Janji Layanan.
- 5.2 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 5.3 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya di Kota Magelang.
- 5.4 Penyebar luasan informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat.
- 5.5 Pemantauan kondisi kesehatan lingkungan di Kota Magelang.
- 5.6 Peningkatan Pelayanan keliling pembuatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 5.7 Peningkatan pelayanan keliling perizinan dan nonperizinan.
- 5.8 Pembentukan Tim Uji Kelayakan untuk pemantauan kualitas lingkungan.
- 5.9 Terlaksananya Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) khusus untuk hewan babi.
- 5.10 Pembangunan Mall Pelayanan Publik
- 5.11 Tercapainya target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5.12 Kampanye anti korupsi.
- 5.13 Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
- 5.14 Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama.
- 5.15 Pengembangan sarana dan prasarana bidang kesehatan di BLUD Rumah Sakit Tidar dan Puskesmas se Kota Magelang.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan tersebut.

B. Sasaran (5 prioritas)

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

1.1 Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Terwujudnya Aparatur yang bersih dan bebas KKN dengan ditandatanganinya Pakta Integritas oleh seluruh PNS.	Prosentase Aparatur yang menandatangani Pakta Integritas.	v	V	v	v
Meningkatnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS.	Prosentase PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja.	v	V	v	v
Terwujudnya pemimpin yang bisa dijadikan teladan.	Prosentase tingkat pelanggaran disiplin pejabat struktural.	v	V	v	v
Tertatanya kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Magelang sesuai dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Prosentase kesesuaian kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah.	v	V	v	v
Tersusunnya dokumen evaluasi Standar Kompetensi Jabatan.	Tersedianya dokumen evaluasi Standar Kompetensi Jabatan.	v	V	v	v
Tersusunnya dokumen Review Evaluasi Jabatan.	Tersedianya dokumen Review Evaluasi Jabatan	v	V	v	v
Tersusunnya Dokumen Serah Terima Jabatan pada saat mutasi jabatan.	- Tersusunnya Perwal serah terima jabatan. - Monev implementasi Perwal sertijab	v	v	v	v
Tersusunnya dokumen kinerja periodik ASN	Tersedianya dokumen Kinerja periodik ASN (E-Kinerja)	v	V	v	v
Tersusunnya dokumen Pola Karier PNS Kota Magelang.	Tersedianya dokumen Pola Karier PNS	v	V	v	v
Tersusunnya Perwal Pola Karier PNS Kota Magelang.	Tersedianya Perwal Pola Karier PNS Kota Magelang.	v	V		
Terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan.	Tersedianya tenaga perancang peraturan perundang-undangan	v	V	v	v

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Fasilitasi dalam rangka peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).	Jumlah dan jenis JFT	v	V	v	v
Terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya pada pendidikan dasar.	- Rasio pendidik berkualifikasi - Adanya pemerataan persebaran guru - Pemenuhan sarpras pendidikan	V V v	V v v	v v v	v v v
Terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga dokter, apoteker dan tenaga kesehatan lingkungan.	- Rasio tenaga kesehatan berkualifikasi - Adanya pemerataan persebaran tenaga kesehatan - Pemenuhan sarpras kesehatan	V V v	v v v	v v v	v v v
	-				
Terwujudnya SIMPEG secara <i>on line</i>	Tersusun dan terpeliharanya SIMPEG secara <i>on line</i>	v	V	v	v
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik PNS.	- Rasio Penyidik PNS dengan jumlah PNS - Frekuensi diklat PPNS	V v	v v	v v	
Meningkatnya peran satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	- Frekuensi pendampingan SPIP pada Perangkat Daerah - Frekuensi diklat SPIP	V v	v v	v v	V v
Meningkatnya kuantitas dan kualitas anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).	- Rasio Anggota BPSK dengan jumlah kasus yang ada - Frekuensi diklat penyelesaian sengketa konsumen		v v	v v	

1.2 Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Meningkatnya penerapan SAKIP.	Meningkatnya nilai SAKIP	v	v	v	v
Meningkatnya hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit	Adanya Peta Proses Bisnis	v	v	v	v
Terwujudnya deteksi dini tentang masalah yang terkait dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme secara efektif.	Adanya Wistle Blowing System	v	v	v	v
Terwujudnya media pengaduan <i>on-line</i> tingkat kota terhadap seluruh pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Kota Magelang, yang dapat diakses secara mudah, cepat dan transparan serta terintegrasi dengan pengaduan online nasional	Adanya media pengaduan <i>on-line</i> tingkat kota yang terintegrasi dengan tingkat provinsi dan nasional.	V	v	v	v
Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Standar/ Maklumat/ Janji Pelayanan di Kota Magelang	Frekuensi Konsultasi publik	v	v	v	v
Terwujudnya pelimpahan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.	Prosentase jumlah kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP.	V	v	v	v
Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam segenap aspek pelayanan ditiap unit kerja.	Terlaksananya asistensi penyusunan SOP	v	v	v	v
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk okum pusat dan daerah	Tersusunnya laporan evaluasi produk hukum	v	v	v	v

1.3 Organisasi

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Terbentuknya Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana RB di tingkat Kota dan Perangkat Daerah agar pelaksanaan	- Terbentuknya Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksanaan RB Tingkat Kota	v	v		

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
reformasi birokrasi dapat terintegrasi dan tercapai secara maksimal.	- Prosentase Perangkat Daerah yang telah menyusun tim RB pada tingkat Perangkat Daerah				
Ditetapkannya Perangkat Daerah percontohan/pilot project bebas KKN dilingkup Pemerintah Kota Magelang.	Adanya Perangkat Daerah percontohan bebas KKN	v	v	v	v
Kejelasan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.	Tersedianya dokumen review Tupoksi Perangkat Daerah	v	v	v	v
Review Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen review ANJAB	v	v	v	v
Review Analisis Beban Kerja.	Tersedianya dokumen review ABK	v	v	v	v
Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah	Tersedianya Inovasi pada Perangkat Daerah	v	v	v	v

2. PRIORITAS YANG HARUS TERUS DI PELIHARA

2.1 Pemerintahan Bersih dan Bebas dari KKN

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Seluruh pejabat struktural dilingkup Pemerintah Kota Magelang menandatangani Pakta Integritas	Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat struktural baru.	v	v	v	v
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas di Kota Magelang	Penyampaian LHKPN	v	v	v	v
Penguatan peran/fungsi satgas SPIP	Terciptanya lingkungan pengendalian internal Perangkat Daerah dengan adanya identifikasi resiko dimasing masing Perangkat Daerah	v	v	v	v
Peningkatan kapasitas UKPBJ untuk penerapan e	Terpenuhinya sarana prasarana	v	v	v	v

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Seluruh pejabat struktural dilingkup Pemerintah Kota Magelang menandatangani Pakta Integritas	Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat struktural baru.	v	v	v	v
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas di Kota Magelang	Penyampaian LHKPN	v	v	v	v
<i>procurement</i>	UKPBJ				

2.2 Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Penguatan kelembagaan BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen)	Terpenuhinya sarana prasarana BPSK	v	v	v	v
Terpeliharanya manajemen mutu bidang pendidikan	Adanya audit mutu bidang pendidikan internal dan eksternal	v	v	v	v
Terpeliharanya manajemen mutu bidang layanan pemerintah daerah untuk Penerbitan Izin dan Layanan Administrasi Umum	Adanya audit mutu bidang layanan pemerintah daerah untuk Penerbitan Izin dan Layanan Administrasi Umum internal dan eksternal	v	v	v	v
Perluasan cakupan hak akses pemanfaatan data Adminduk kepada instansi pelayanan public	Peningkatan Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan data Adminduk	v	v	v	v
Terwujudnya layanan pencetakan dokumen kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Tersedianya Anjungan Dukcapil Mandiri	v	v	v	v
Mempertahankan penghargaan Adipura Kencana	Terpenuhinya indikator-indikator penilaian Adipura kencana	v	v	v	v

2.3 Kapasitas dan Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Terwujudnya Organisasi Pemerintah Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	Terbentuknya organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan aturan	v	v	v	v
Terwujudnya pengembangan sistem informasi manajemen	Meningkatnya index SPBE Kota Magelang	v	v	v	v
Monev pelaksanaan RB	Laporan Monev RB	v	v	v	v
Terwujudnya indikator kinerja dalam dok perencanaan SMART	Data Indikator yang SMART	v	v	v	v
Terwujudnya data asset daerah yang akurat	Tersedianya dokumen asset yang akurat	v	v	v	v

3. PRIORITAS YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

3.1 PELAYANAN SEKTOR STRATEGIS

3.1.1. PRIORITAS SEKTOR PENDIDIKAN

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Pemberian beasiswa kepada Siswa SD/SMP	Tersalurkannya beasiswa tepat sasaran	v	v	v	v
2	Pemberian dana BOSDA dan BOS PAUD	Tersalurkannya dana BOS	v	v	v	v
3.	Perkembangan penerapan SMM ISO 9001 pada Satuan Pendidikan	Data Sertifikasi SMM ISO 9001	v	v	v	v

3.1.2. PRIORITAS SEKTOR KESEHATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Terlaksananya Update data Penerima Bantuan iuran (PBI) BPJS yang akurat	Data penerima Bantuan Iuran BPJS yang akurat	v	v	v	v
2.	Pengembangan dan penerapan SMM pada Bidang Kesehatan	Akreditasi SMM Bidang Kesehatan	v	v	v	v

3.1.3. PRIORITAS SEKTOR PERIZINAN DAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Pengembangan penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada Disdukcapil	Sertifikat SMM ISO 9001		V		
2.	Pengembangan penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu	Resertifikasi SMM ISO 9001		V		
3	Pengembangan pelayanan Publik Terpadu dan terintegrasi	Pembangunan Mall Pelayanan Publik		V		
4.	Terwujudnya layanan pencetakan dokumen kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Tersedianya Anjungan Dukcapil Mandiri	v	v	v	v

4. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan dengan baik	v	v	v	v
.	Tercapainya target perolehan PAD	Prosentase target perolehan PAD dari sektor PBB	v	v	v	v
2.	Tersedianya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan IKU	v			
3.	Teredukasinya masyarakat dalam memanfaatkan layanan adminduk	Peningkatan Cakupan masyarakat yang memanfaatkan	v	V	v	v

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
	secara daring	layanan adminduk secara daring				
4.	Peningkatan Perjanjian Kerjasama Hak Akses Pemanfaatan Data Adminduk	Cakupan hak akses pemanfaatan data Adminduk oleh instansi pelayanan publik	v	v	v	v
5.	Pelayanan keliling pembuatan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Prosentase cakupan layanan keliling pembuatan dokumen adminduk dan capil	v	v	v	v
6.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terpantaunya bahan pangan dan berbahaya	v	v	v	v
7.	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Frekuensi penyebaran informasi kesehatan	v	v	v	v
8.	Pemantauan Kondisi kesehatan lingkungan	Data kesehatan lingkungan	v	v	v	v
9.	Pembentukan TIM UJI KELAYAKAN untuk pemantauan kondisi lingkungan	Terbentuknya TIM UJI KELAYAKAN		v		
10.	Terlaksananya standar pelayanan Rumah pemotongan Hewan (RPH) khusus untuk hewan babi	Terpenuhinya standar pelayanan RPH khusus babi		v		
11.	Pelayanan Perizinan keliling	Cakupan pelayanan perizinan keliling	v	v	v	v
12.	Kampanye anti korupsi	Terinformasikannya budaya anti korupsi	v	v	v	v
13.	Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang	Terinformasikannya budaya anti penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang	v	v	v	v
14.	Pengembangan sarpras Pendidikan dasar dan menengah	Terpenuhinya sarpras pendidikan dasar dan menengah	v	v	v	v
15.	Pengembangan sarana prasarana Kesehatan	Terpenuhinya sarana prasarana kesehatan	v	v	v	v
16.	Tertatanya	Data monitoring	v	v	v	v

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
	pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Magelang	dan evaluasi PKL				
17.	Pelayanan adminstrasi kependudukan online	Adminduk online	v	v	v	v

5. ZONA INTEGRITAS

No.	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Perangkat Daerah Berpredikat (WBBM)	Perangkat Daerah berpredikat (WBK) (WBBM)		v	v	v

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I	PRIORITAS PEMBENAHAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH									
I.1	Sumber Daya Manusia									
1	Terwujudnya Aparatur yang bersih dan bebas KKN melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS.	Prosentase Aparatur yang menandatangani Pakta Integritas								
	Program:									
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah Aparatur Orang						BKPSDM		
	2) Kampanye anti praktik KKN.	Jumlah Kampanye Kali						Inspektorat		
2	Meningkatnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS.	Prosentase PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja								
	Program:									

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	1) Sosialisasi Budaya Kerja dan Budaya Melayani	Frekuensi sosialisasi						Bagian Organisasi		
		Kali								
	2) Perubahan Perwal Budaya Kerja	Dokumen Perwal						Bagian Organisasi		
		1 Perwal								
3	Terwujudnya pemimpin yang bisa dijadikan teladan.	Prosentase tingkat pelanggaran disiplin pejabat struktural								
	Program:									
	1) Penetapan Ka. Perangkat Daerah sebagai Role Model	Perwal Role Model (pembaharuan SK 069/57/112 tahun 2017)						BKPSDM		
		1 Perwal / SK								
	2) Training Pengembangan Karakter	Frakuensi training						BKPSDM		
		1 kali / tahun								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	1) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Serah Terima Jabatan	Perwal Serah Terima Jabatan						BKPSDM	
		1 Perwal							
	2) Monev Implementasi Peraturan Walikota tentang Serah Terima Jabatan	Laporan Monitoring Evaluasi						BKPSDM	
		dokumen monev							
6	Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan							
	Program:								
	1) Penyusunan dokumen evaluasi SKJ	Dokumen evaluasi SKJ						Bagian Organisasi	
		1 dokumen							
7	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan	Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan							
	Program:								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	1) Pelaksanaan Jabatan Evaluasi	Review Dokumen Evaluasi Jabatan						Bagian Organisasi	
	(Quick Wins)	1 dokumen							
8	Tersusunnya Kode Etik PNS Kota Magelang	Tersedianya Kode Etik PNS Kota Magelang							
	Program:								
	1) Penyusunan Kode Etik PNS Kota Magelang	Dokumen Kode Etik PNS						BKPSDM	
		1 dokumen							
9	Tersusunnya dokumen Pola Karier PNS Kota Magelang	Tersedianya dokumen Pola Karier PNS							
	Program:								
	1) Penyusunan Pola Karier PNS Kota Magelang	Dokumen Pola Karier PNS						BKPSDM	
		1 dokumen							
	2) Penyusunan Perwal pola karier	Perwal pola karier							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
10.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas anggota Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK).	- Rasio Anggota dengan jumlah kasus yang ada - Frekuensi dilkat penyelesaian sengketa konsumen								
	Program:									
	1) Rekrutmen/penambahan anggota Tim BPSK.	Penetapan Anggota BPSK						Disperindag		
		Orang								
	2) Dilkat Penyelesaian Sengketa Konsumen.	Frekuensi Dilkat						Disperindag / BKPSDM		
		Kali								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	1) Bintel fungsional tenaga perancang peraturan perundangan-undangan	Frekuensi Bimtek						Bagian Hukum		
		Kali								
	2) Rekrutmen tenaga perancang peraturan perundangan-undangan	Tersedianya Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan						Bagian Hukum		
		Orang								
13	Fasilitasi dalam rangka peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah dan Jenis JFT						BKPSDM		
		Jabatan								
14.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik PNS	- Rasio Penyidik PNS dengan jumlah PNS - Frekuensi diklat PPNS								
	Program:									
	1) Rekrutmen PPNS	Anggota PPNS						BKPSDM / Satpol PP		

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Orang							
	2) Diklat PPNS	Frekuensi diklat PPNS						BKPSDM / Satpol pp	
		Kali							
15	Terwujudnya SIMPEG secara online	Teraksessnya SIMPEG secara <i>on line</i>							
	Program:								
	1) Pembaruan SIMPEG online	SIMPEG <i>on line</i>						BKPSDM	
	(Quick Wins)	1 aplikasi SIMPEG							
16	Meningkatnya kinerja asn	Teraksessnya kinerja online							
	Program:.....								
	1) Data Kinerja online	1 aplikasi E kinerja						BKPSDM	
	(Quick win)								
I.2	TATALAKSANA								
1	Meningkatnya penerapan SAKIP	Meningkatnya nilai SAKIP							
	Program:								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	1) Evaluasi produk hukum di Kota Magelang.	Dokumen Evaluasi Produk Hukum						Bagian Hukum	
		1 dokumen hasil evaluasi							
3	Terwujudnya pelimpahan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Persentase kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP							
	Program:								
	1) Reviu pelimpahan kewenangan DPMPTSP	Data Reviu pelimpahan kewenangan						DPMPTSP / Inspektorat	
		1 dokumen							
4	Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam segenap aspek pelayanan di tiap unit kerja.	Terlaksananya asistensi penyusunan SOP							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Program:								
	1) Asistensi penyusunan SOP	Asistensi Penyusunan SOP Perangkat Daerah						Bagian Organisasi	
	(Quick Wins)	Perangkat Daerah							
	2) Penyusunan SOP Tingkat Perangkat Daerah	SK SOP Perangkat Daerah						Perangkat Daerah	
	(Quick Wins)	29 SK SOP Perangkat Daerah							
5	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Standar/ Maklumat/ Janji Pelayanan di Kota Magelang	Frekuensi Konsultasi Publik (FKP)							
	Program:								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana RB di tingkat Kota dan Satuan Kerja agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terintegrasi dan tercapai secara maksimal.	- Terbentuknya Tim RB Tingkat Kota (pembaharuan SK nomor 069/56/112 tahun 2017 tentang tim pengarah dan pelaksana reformasi birokrasi) - Prosentase Perangkat Daerah yang telah menyusun tim RB pada tingkat Perangkat Daerah							
	Program:								
	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana RB di tingkat Kota Magelang dan Tingkat Perangkat Daerah.	SK Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana RB Tingkat Kota dan Perangkat Daerah							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		1 Surat Keputusan tingkat Kota						Bagian Organisasi	
		29 Surat keputusan tingkat Perangkat Daerah						Perangkat Daerah	
	2) Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi	Laporan Monev Reformasi Birokrasi						Bagian Organisasi	
		1 Dokumen							
2	Ditetapkannya Perangkat Daerah percontohan/pilot project bebas KKN diilingkup Pemerintah Kota Magelang.	Adanya Perangkat Daerah percontohan WBK dan WBBM							
	Program:								
	1) Penetapan Perangkat Daerah percontohan / pilot project bebas KKN diilingkup Pemerintah Kota Magelang.	Jumlah Perangkat Daerah Percontohan WBK dan WBBM						Inspektorat	
		 Perangkat Daerah							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3	Kejelasan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	- Adanya review Tupoksi Perangkat Daerah - Review Analisis Jabatan - Review Beban Kerja							
	Program:								
	1) Reviu tupoksi dan uraian tugas Perangkat Daerah	Data reviu Tupoksi						Bagian Organisasi	
		1 dokumen reviu Tupoksi							
	2) Reviu Analisis Jabatan	Data reviu Anjab						Bagian Organisasi	
		1 dokumen reviu Anjab							
	3) Reviu Beban Kerja	Data reviu ABK						Bagian Organisasi	
		1 dokumen reviu ABK							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
II	PRIORITAS YANG HARUS TERUS DIPELIHARA								
II.1	Pemerintahan Bersih dan Bebas dari KKN								
1	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN) oleh seluruh Pejabat pimpinan tinggi Kota Magelang	Penyampaian LHK ASN tepat waktu							
	Program:								
	1) Penyusunan Laporan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN)	Data LHKASN Kota Magelang						Inspektorat	
	2) Monitoring dan evaluasi data Laporan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN)	Laporan LHKASN Kota Magelang						Inspektorat	
		1 dokumen							
3	Peningkatan kapasitas ULPBJ	Terpenuhinya sarana prasarana ULPBJ							
	Program:								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana UKPBJ	Tercukupinya sarpras UKPBJ						UKPBJ		
		unit								
	2) Penyusunan SOP UKPBJ	SOP UKPBJ						UKPBJ		
		1 dokumen								
4	Terlaksananya Inventarisasi dan Reevaluasi Aset Daerah	Data Inventarisasi dan Reevaluasi Aset Daerah yang Akurat								
	Program:									
	1) Reevaluasi/Appraisal asset/barang daerah	Data Appraisal asset/barang daerah						BPKAD		
		1 dokumen								
5	Tersusunnya APBD Tepat Waktu	Pengesahan Dokumen APBD Tepat Waktu								
	Program:									
	1)							BPKAD		
6	Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB)	Penyusunan Anggaran Berbasis ASB								
	Program:									
	1)							BPKAD		

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
II.2	Kualitas Pelayanan Publik								
1	Penguatan kelembagaan BPSK	Terpenuhinya sarana prasarana BPSK							
	Program:								
	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana BPSK	Terpenuhinya Sarpras BPSK						Disperindag	
		Unit/jenis							
	2) Penyusunan SOP BPSK	SOP BPSK						Disperindag	
		1 dokumen							
2	Terpeliharanya manajemen mutu Bidang Pendidikan	Adanya data hasil manajemen mutu Bidang Pendidikan							
	Program:								
	1) Audit Internal dan Eksternal manajemen mutu	Data Penilaian Audit						inspektorat	
		1 dokumen penilaian manajemen mutu							
	2) Manajemen Reviu	Laporan Manajemen Reviu						inspektorat	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	Terpeliharanya mutu pelayanan pemerintah daerah untuk Penerbitan Izin dan Layanan Administrasi Umum	Adanya manajemen audit mutu layanan Bidang pemerintah daerah untuk Penerbitan Izin dan Layanan Administrasi Umum internal dan eksternal							
	Program:								
	1) Audit Internal dan Eksternal ISO	Data Penilaian Audit						DPMPTSP	
		2 dokumen akreditasi ISO							
	2) Manajemen Reviu	Laporan Manajemen Reviu						DPMPTSP	
		1 dok Manajemen Reviu							
5	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kurang Mampu di Kota Magelang	Tersalurkannya santunan kematian tepat sasaran							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Program:								
	1) Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kurang Mampu di Kota Magelang	% cakupan santunan kematian						Bagian Kesra	
		orang							
6	Nilai rata-rata hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Data survey kepuasan pelanggan							
	Program:								
	1) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	Data kepuasan Pelanggan						Bagian Organisasi	
		1 Dokumen							
II.3	Kapasitas dan Akuntabilitas								
1	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	Terbentuknya organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan aturan							
	Program:								
	1) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan						Bagian Organisasi	
		1 dokumen							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2	Terwujudnya pengembangan sistem informasi manajemen dan peningkatan indeks SPBE Program:	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-gov							
	1) Penerapan <i>e-gov</i>	Peningkatan nilai SPBE						Diskominfo	
		Perangkat Daerah							
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program:	Laporan monev Reformasi Birokrasi							
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Monev RB						Bagian Organisasi	
4	Terwujudnya indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang SMART (Reviu Indikator Kinerja Tingkat Kota) Program:	1 dokumen Data Indikator Kinerja yang SMART							

No.	Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	Target	4	5	6	7	8	10	11
	1) Reviu Indikator Kinerja Tingkat Kota	Laporan Hasil Reviu							Bappeda	
		1 dokumen								
3	PRIORITAS SEKTOR									
	Prioritas Sektor Pendidikan									
1	Pemberian beasiswa kepada Siswa SD/SMP	Tersalurkannya beasiswa tepat sasaran								
	Program:									
	1) Pendataan dan Pendistribusian beasiswa	Data Penerima beasiswa							Dinas Pendidikan	
		1 dokumen								
2	Penetapan point domisili dan asal sekolah bagi peserta didik dari Kota Magelang	Penetapan point domisili dan asal sekolah								
	Program:									
	1) Penyusunan Kriteria, Prosedur dan Mekanisme Penerimaan Siswa Baru online	Dokumen Kriteria, Prosedur dan Mekanisme PSB							Dinas Pendidikan	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator		Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target			2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
		1 dokumen								
3	Perkembangan penerapan SMM ISO 9001 pada Satuan Pendidikan	Data Sertifikasi SMM ISO 9001								
	Program:									
	1) Pemeliharaan Sertifikasi SMM ISO 9001:	Sertifikasi SMM ISO 9001						Dinas Pendidikan		
		Satuan Pendidikan								
	2) Monitoring dan Evaluasi penerapan SMM ISO 9001	Laporan Monev penerapan SMM ISO						Dinas Pendidikan		
		1 dokumen								
	Priorias Sektor Kesehatan									
1	Terlaksananya Update data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang akurat	Data Penerima Bantuan Iuran BPJS yang akurat								
	1) Penentuan Kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI	Data PBI						DKK		
		1 dokumen								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
2	Pengembangan dan penerapan SMM pada Bidang Kesehatan	Akreditasi SMM Bidang Kesehatan								
	Program:									
	1) Penyiapan data penerapan Standar Manajemen Mutu Bidang Kesehatan	Dokumen Standar Manajemen Mutu						BLUD RSUD Tidar/ DKK		
		1 dokumen								
	2) Monitoring dan Evaluasi penerapan SMM Bidang Kesehatan	Laporan Monev penerapan SMM						BLUD RSUD Tidar/ DKK		
		1 dokumen								
	Priorias Sektor Perizinan dan Adminitrasi Kependudukan									
±	Pengembangan penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada DPMP TSP									
	Program:									
	1) Pemeliharaan Sertifikasi SMM ISO 9001	Sertifikasi SMM ISO 9001						DPMP TSP		
		Sertifikasi								

[illegible]

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024			
1	2	Target 3	4	5	6	7	8	10	11	
4	Program:...									
	Pengembangan pelayanan Publik Terpadu dan terintegrasi	Gedung Pelayanan Publik Mall						DPU /DPMPTSP		
1	Peningkatan jaminan mutu atas pelayanan dokumen kependudukan melalui sertifikat ISO (memerlukan pendampingan dan pembenahan untuk mendapatkan sertifikat ISO bagi Disdukcapil Kota Magelang.									
	Program:									
	1) Penilaian Gap Analysis	Hasil Gab Analysis								
	2)Pelatihan dan Persiapan Implementasi ISO.	Terlaksananya dan pelatihan persiapan implementasi ISO						Disdukcapil		
	3) Pengembangan Sistem dan Dokumentasi Adminduk. ...	Terbangunnya Sistem dan Dokumentasi Adminduk						Disdukcapil		

No.	Sasaran /Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	4) Impelementasi Sistem dan Dokumen Disdukcapil sesuai Persyaratan ISO	Teraplikasikannya Sistem dan Dokumen Disdukcapil sesuai persyaratan ISO						Disdukcapil	
2	Peningkatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan perluasan cakupan hak akses pemanfaatan data Adminduk kepada instansi pelayanan public Program:								
	1) Sinergi bersama mitra	Terjalinnya sinergitas antar mitra						Disdukcapil	
	2) Koordinasi lintas sektoral	Terlaksananya koordinasi lintas sektoral						Disdukcapil	
	3) Monitoring dan Maintenance hak akses ke mitra	Terlaksananya monitoring dan Maintenance hak akses ke mitra						Disdukcapil	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3	Terwujudnya layanan pencetakan dokumen kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)								
	Program:								
	1) Pengembangan Pelayanan Publik Mandiri	Tersedianya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)						Disdukcapil	
	2) Pemeliharaan mesin ADM	ADM berfungsi dengan baik						Disdukcapil	
4	Teredukasinya masyarakat dalam memanfaatkan layanan Adminduk secara daring								
	Program:								
	1) Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Adminduk	Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Adminduk						Disdukcapil	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	2) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan						Disdukcapil	
	3) Koordinasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan						Disdukcapil	
	4) Pelayanan Adminduk keliling	Terlaksananya Pelayanan Adminduk keliling						Disdukcapil	
4.	PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
1.	Tersedianya Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan							
2.	Tersedianya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menetapkan IKU						Bappeda	
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terpantaunya bahan pangan dan berbahaya						DKK/Disperta n	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
5.	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Frekuensi penyebaran informasi kesehatan						DKK	
6.	Pemantauan Kondisi Kesehatan Lingkungan	Data kesehatan lingkungan						DLH	
7.	Pelayanan Keliling Pembuatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase cakupan layanan keliling pembuatan dokumen adminduk dan capil						Disdukcapil	
8.	Pembuatan Komisi Amdal untuk pemantauan kondisi lingkungan	Terbentuknya Komisi Amdal						DLH	
9.	Terlaksananya standar pelayanan rumah pemotongan hewan (RPH) khusus untuk hewan babi	Terpenuhinya Standar Pelayanan RPH Khusus babi						DLH	
10.	Adanya sarana pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis web	Terpenuhinya sarana prasarana pembayaran pajak dan retribusi berbasis web						BPKAD	
11.	Pelayanan Perizinan Keliling	Cakupan pelayanan perizinan keliling						DPMP TSP	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
12.	Kampanye Anti Korupsi	Terinformasikannya Budaya Anti Korupsi						Inspektorat	
13.	Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang	Terinformasikannya Budaya Anti Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang						Kesbangpol	
14.	Pengembangan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah	Terpenuhinya sarpras pendidikan dasar dan menengah						Disdik	
15.	Pengembangan Sarana Prasarana Kesehatan	Terpenuhinya Sarpras Kesehatan						DKK	
16.	Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Magelang	Data Monitoring dan Evaluasi penataan PKL						Disperindag	
17.	Pelayanan administrasi kependudukan online	Adminduk online							
18.	Tercapainya target PAD dari sektor PBB	Tercapainya target PAD sektor PBB							
	Program:								
	1) Pekan Pembayaran PBB	Pekan PBB						BPKAD	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)				Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)
		Target		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
5	Zona Integritas								
1									
1	Terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat (WBK) (WBBM)								
	Program.....								
	1. Pembinaan dan asistensi Perangkat Daerah pilot projek ZI	Perangkat berpredikat (WBBM)						DPMPTSP/CA PTL/RSUD/IN SPEKTORAT/ BAGIAN ORGANISASI	

Bab 4 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Selain itu kegiatan monitoring untuk mengetahui kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Adapun Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan termasuk didalamnya sasaran dan indikator yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam rencana tahunan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan.

Adapun dasar hukum monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi.
6. Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015-2019.

A. Keluaran Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024 diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut :

1. Diketuinya tingkat kemajuan kegiatan tahun sebelumnya, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.
2. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindak pemecahan masalah yang dilakukan.
3. Terlaksananya pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada.

4. Tersedianya umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan di masa yang akan datang.
5. Tersedianya laporan berkala.
6. Terbangunnya sikap mental aparat yang transparan.

B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024 dilaksanakan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kota dan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). ***Pada tingkat Perangkat Daerah***, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah kota yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2024, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap triwulanan.
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali.
3. Pengelolaan pengaduan (*complaint handling management*).
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Kota Magelang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota yang terbagi dalam 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana 3 (tiga) target sasaran reformasi birokrasi, yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin triwulanan dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi tingkat kota, paling tidak dilakukan dua kali dalam setahun atau semesteran.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan triwulanan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah.

C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi pada lingkup Perangkat Daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi tingkat kota secara rutin, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan secara insidental.
3. Tim Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
4. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan tersebut dapat dibawa pada kelompok kerja di tingkat kota.
5. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi tingkat kota yang dikoordinir oleh ketua masing-masing pokja.

Pada lingkup Pemerintah Kota Magelang mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Magelang yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tingkat kelompok kerja dibahas dalam forum monitoring dan evaluasi tingkat kota untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
3. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat tim tingkat kota.
4. Hasil monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat kota dilaporkan tiap semester kepada Walikota Magelang selaku ketua umum reformasi birokrasi tingkat kota.

Bab 5. Penutup

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) pengampu program/kegiatan fokus perubahan reformasi birokrasi untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sehingga dapat terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang 2021-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Magelang harus terus dibangun agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

